

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa dipandang memiliki kewenangan, tugas, serta tanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Masambe et al., 2021). Karena itu, berbagai upaya telah ditempuh untuk memperkuat kemandirian desa, salah satunya melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dinilai mampu mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat otonomi des (Karsono & Syauket, 2021). Sejalan dengan itu, pemerintah juga menggulirkan kebijakan Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dialokasikan untuk berbagai keperluan desa (PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa).

Beberapa peneliti sepakat bahwa seluruh upaya tersebut dapat meningkatkan potensi desa (Arifin, 2018), Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016), penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kuat, pelaksanaan proyek pembangunan, mendorong kehidupan bermasyarakat, dan memberdayakan penduduk desa (Bender, 2016) dan tujuan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kondisi desa yang aman, nyaman, dan damai, menjaga serta mengembangkan tradisi musyawarah atau mufakat, memperkuat nilai kekeluargaan dan semangat kerja sama yang mendorong keaktifan masyarakat (Paat et al., 2021).

Beberapa penelitian mengkaji upaya kebijakan pembangunan desa dalam perspektif ekonomi Islam (Samud, 2018), perspektif hukum (Akhmaddhian & Yuhandra, 2018) dan kerjamasa (Akhmaddhian & Yuhandra, 2018). Belum banyak yang melihat bagaimana peran pemerintah dalam mendukung kemajuan desa. Beberapa program digulirkan oleh pemerintah Nasional untuk meningkatkan kemandirian desa, misalnya melalui kebijakan dana desa (Hulu et al., 2018) dan kebijakan anggaran desa (Tangkumahat et al., 2017) . Beberapa peneliti banyak yang membahas kebijakan tersebut (Shuha, 2018).

Upaya peningkatan kemandirian desa sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah nasional, beberapa pemerintah desa memiliki political will untuk mendukung kemandirian desa, yang digulirkan oleh pemerintah daerah (Triyanto, 2018). Faktor pendukung dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Bojongmengger yaitu dari Sumber Daya (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan), serta Otoritas atau Kewenangan (Garvera et al., 2021). Dalam konteks pembangunan desa yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian, Pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, dan menekan angka kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai (Habiby et al., 2023). Lebih lanjut, ketentuan tersebut diperkuat dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur pedoman dan memberikan rekomendasi mengenai pembangunan desa, yang menekankan peran strategisnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan sumber penghidupan masyarakat, dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan bersama (Wildasari, Budi Setiawati, 2020).

Kabupaten Bogor yang terletak di Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah seluas kurang lebih 2.986,20 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 40 kecamatan, 410 desa, serta 16 kelurahan (RPJIM Kabupaten Bogor, 2019). Dalam rangka meningkatkan infrastruktur, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas serta peran pemerintah desa. Salah satu bentuk memperkuat kapasitas peran pemerintah desa adalah melalui program yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi suatu program. Program SAMISADE di Kabupaten Bogor dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020, yang mengatur pedoman pemberian bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Pemerintah Kabupaten Bogor mencanangkan inisiatif SAMISAE (satu miliar satu desa) pada tahun 2020, Program ini berorientasi utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui aspek ekonomi maupun sosial (Mimin & Saefullah, 2023). Fokusnya adalah mendorong keterlibatan

aktif warga desa dalam proses pembangunan, baik melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial maupun melalui pendanaan kegiatan pembangunan yang dipilih langsung oleh masyarakat. Inisiatif tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, hingga optimalisasi potensi desa.

Program ini didasarkan pada keadaan desa di kabupaten bogor. Menurut data, terdapat 187 desa maju dan 92 desa tertinggal di Kabupaten Bogor pada tahun 2018. Wilayah utara didominasi oleh desa-desa berstatus maju, sementara wilayah lainnya didominasi oleh desa-desa berstatus tertinggal. Wilayah utara umumnya lebih maju dibandingkan wilayah lain karena kepadatan penduduk dan jaraknya yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi, yang mendorong perkembangan kota. Bogor memiliki 45 desa belum berkembang, 94 desa berkembang, dan 12 desa otonom pada tahun 2019. Sisanya, 265 desa ditetapkan sebagai desa berkembang, yang terdiri dari 29 desa mandiri, 131 desa berkembang, 252 desa berkembang, dan empat desa terbelakang pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) berupaya meningkatkan status desa miskin menjadi desa berkembang atau maju melalui inisiatif SAMISADE.

Program ini menekankan pada kerjasama dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan di desa binaan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Infrastruktur Lokal, yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung kemandirian lokal sekaligus mendorong masyarakat desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur semakin cepat, dan pembangunan yang memadai niscaya akan berdampak jangka panjang dalam membentuk masa depan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan konektivitas regional. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan saat ini didasarkan pada program-program yang kemudian berkembang menjadi proyek-proyek dengan berbagai kegiatan implementasi (Jamaluddin et al., 2018).

Kajian tentang program ini sudah dilakukan namun demikian kajian ini hanya melihat dari perspektif hukum (Mimin & Saefullah, 2023) maupun

implementasi kebijakan (A. C. Febrianti et al., 2023). Kebijakan sendiri diartikan sebagai kebijakan dana desa (Leo Agustino, 2003) Setiap kebijakan memiliki tujuan dan sasaran sendiri. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dari kebijakan maka diperlukan sebuah evaluasi. Evaluasi kebijakan adalah proses yang melibatkan penilaian atau perkiraan terhadap suatu kebijakan, meliputi aspek substansi, pelaksanaan, serta efek atau dampak yang ditimbulkannya (Anderson, 1975). Evaluasi juga dapat dimaknai sebagai proses penaksiran yang bertujuan memberikan informasi mengenai sejauh mana suatu program atau kegiatan berhasil dicapai (Faujan, 2019). Menurut Stufflebeam yang dikutip dalam Arikunto (2006:1), evaluasi dipahami sebagai sebuah proses untuk mencari, menggambarkan, dan menyediakan informasi yang relevan serta berguna bagi pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan (E. Yunida, 2017). Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti kemudian merumuskan fokus penelitian dengan judul “Evaluasi Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi Program Satu Miliar Satu Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam Tujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi desa sebagai dasar mewujudkan pembangunan desa ?
2. Bagaimana dampak SAMISADE terhadap infrastruktur desa ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk mengevaluasi program SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa). Adapun manfaat yang dilakukan oleh peneliti adalah agar dapat bermanfaat bagi peneliti dan orang lain, diantaranya yaitu:

### 1 Manfaat Teoritis

- a Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan pihak lain yang memerlukan referensi untuk kajian tambahan mengenai permasalahan dan tema perdebatan yang dapat diterima terkait dengan evaluasi program SAMISADE.
- b Penelitian ini dirancang untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut dan membantu peneliti memperkuat keterampilan mereka, khususnya dalam mengevaluasi program SAMISADE.

### 2 Manfaat Praktis

#### a Bagi Pemerintah

Sebagai informasi dan saran bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyusun program yang tepat guna melaksanakan anggaran Bantuan Keuangan Prasarana Desa.

#### b Bagi Masyarakat

Kajian bertujuan memberikan wawasan kepada masyarakat terkait program SAMISADE yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta tujuan

program tersebut untuk mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bogor.

#### **1.4 Definisi Konseptual**

Dalam kajian ilmu sosial, konsep dipahami sebagai istilah maupun deskripsi yang berfungsi menggambarkan suatu peristiwa, kondisi objek kajian secara abstrak. Definisi konseptual sendiri merupakan bentuk definisi yang masih bersifat ide, memiliki makna yang abstrak, namun tetap dapat ditangkap secara intuitif (Sri Hernawati). Adapun dalam penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan yaitu :

##### **1.4.1 Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi dipahami sebagai suatu proses penyampaian informasi mengenai tingkat penyelesaian suatu tindakan serta perbandingan hasil yang diperoleh dengan standar yang ditentukan untuk menentukan apakah ada perbedaan, dan bagaimana manfaat pekerjaan tersebut dibandingkan dengan harapan yang diharapkan (Sulaiman adam,2018).

Arikunto menjelaskan penilaian sebagai praktik menemukan sesuatu yang berharga tentang suatu hal; pencarian ini juga melibatkan pencarian Evaluasi dipahami sebagai penyediaan informasi yang berguna untuk menilai keberlangsungan suatu program, hasil produksi, proses, maupun pilihan strategi alternatif yang ditujukan guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu, menurut Suchman, evaluasi dimaknai sebagai proses untuk mengidentifikasi berbagai hasil dari rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (suharsimi).

##### **1.4.2 Program Samisade**

Program samisade adalah program yang di buat untuk membangun insfrastrur di kabupaten bogor, dan di kembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kegiatan tersebut. serta Pemerintah daerah untuk mewujudkan program ini. Tujuan dari

program ini untuk wilayah Kabupaten Bogor untuk mendorong peningkatan ekonomi desa. Secara umum program ini sebagai dasar mewujudkan pembangunan desa dan menjadi desa yang mandiri.

## **1.5 Definisi Operasional**

Untuk memahami sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, penelitian menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik berdasarkan pemikiran Thomas R. Dye (2002), yang menekankan pentingnya analisis atas keputusan pemerintah dalam bentuk program atau tindakan nyata.

### **1.5.1 Pencapaian target program**

Pencapaian target program adalah tingkat keberhasilan program dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Warman et al., 2023). Berikut adalah indikator keberhasilan pencapaian target program :

1. Persentase realisasi kegiatan dibanding target (fisik & nonfisik).
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu.
3. Jumlah output yang sesuai dengan indikator kinerja (misalnya pembangunan infrastruktur sesuai volume yang direncanakan).

### **1.5.2 Kesesuaian dengan rencana**

Kesesuaian dengan rencana adalah derajat kepatuhan pelaksanaan program terhadap perencanaan awal baik dari segi prosedur, waktu, maupun alokasi sumber daya (Agista et al., 2025). Berikut adalah indikator keberhasilan kesesuaian program dengan rencana :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.
2. Kesesuaian jenis kegiatan dengan dokumen perencanaan (proposal, RKPDDes, APBDDes).
3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana pembiayaan..

### **1.5.3 Objektivitas**

Objektivitas adalah tingkat keterbukaan, kejujuran, dan netralitas dalam pelaksanaan dan evaluasi program, tanpa adanya keberpihakan yang menguntungkan kelompok tertentu (Martins & Toletina, 2024).

Berikut adalah indikator keberhasilan objektivitas program :

1. Transparansi dalam penyusunan dan penyampaian laporan program.
2. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengambilan keputusan.
3. Mekanisme pengawasan independen (audit internal/eksternal).
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keadilan distribusi manfaat program.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Saryono dalam Hamongsina et al. (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan karakteristik khas dari fenomena sosial yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Senada dengan itu, Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti objek dan kondisi yang dialaminya. Pemilihan sampel biasanya dilakukan secara purposive atau snowball, sedangkan pengumpulan data memanfaatkan triangulasi atau kombinasi beberapa teknik. Analisis dilakukan secara induktif, dengan fokus pada pemaknaan fenomena daripada pencapaian generalisasi (Nurrisa et al., 2025). Adapun jenis penelitian deskriptif dipakai untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena sosial, menjelaskan hubungan antarvariabel, serta mengungkap implikasi terhadap permasalahan yang diteliti, misalnya pada kajian mengenai Evaluasi Program SAMISADE dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.

### **1.7 Sumber Data**

Sumber data memengaruhi proses pengumpulan data. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis :

#### **1.7.1 Data Primer**

Sumber data ini umumnya berasal dari informan yang dipilih berdasarkan relevansi dan kemampuan mereka memberikan informasi yang akurat, salah satunya melalui wawancara mendalam. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengakses data langsung dari instansi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, dan kontekstual terkait pelaksanaan program serta kebijakan yang diterapkan di tingkat desa.

### **1.7.2 Data Sekunder**

Jenis data ini berfungsi melengkapi dan memperkuat data primer, dengan mengacu pada berbagai referensi seperti literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, maupun sumber pustaka lainnya. Data sekunder diambil dari web resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor untuk mendukung penelitian ini.

### **1.8 Subjek Penelitian**

Menurut J. Moleong dalam Iswahyudi et al. (2023), pengumpulan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber dalam sebuah penelitian memerlukan pengambilan sampel, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan topik permasalahan penelitian dalam konteks yang menarik dan unik. Lebih lanjut, data tersebut akan digunakan untuk menginformasikan desain dan teori penelitian. Informan penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bogor
2. Perwakilan Staff dan pelaksanaan teknis lapangan program SAMISADE Kabupaten Bogor
3. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan Program SAMISADE

### **1.9 Teknik Pengumpulan Data**

Diperlukan pemilihan strategi yang tepat dan terencana dalam mengumpulkan data agar data valid dan reliabel sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik observasi langsung dan tidak langsung. Pada observasi langsung, peneliti menjelaskan dengan gamblang tujuan dari kegiatan

observasi kepada informan yang menjadi subjek penelitian. Sementara itu, observasi tidak langsung dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan adanya informasi yang ditutup-tutupi oleh sumber data. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi data serta fakta di lapangan, khususnya terkait kondisi infrastruktur dan efektivitasnya dalam mendukung pengembangan masyarakat.

## 2. Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan mengikuti pedoman dan standar yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor, baik berupa informasi kualitatif maupun data statistik yang relevan.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi melengkapi prosedur pengumpulan data studi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai gambar atau foto yang berkaitan dengan lampiran, data atau tabel yang dipublikasikan di arsip, dan makalah yang berkaitan dengan program SAMISADE di Kabupaten Bogor.

### **1.10 Teknik Analisis Data**

#### 1. Pengumpulan Data

Seluruh hasil dari proses tersebut kemudian dicatat serta dihimpun dalam catatan lapangan sebagai bahan analisis lebih lanjut. Catatan lapangan mencakup semua temuan peneliti selama proses pengumpulan data, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan referensi untuk tahap-tahap pengumpulan data selanjutnya.

#### 2. Reduksi Data

Proses peringkasan merupakan tahap seleksi yang dilakukan peneliti untuk menyortir masalah-masalah pokok dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian. Peringkasan difokuskan pada pengumpulan data yang mendukung evaluasi program SAMISADE, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah, menggabungkan, serta menilai data yang bermakna. Tujuan penyajian data adalah untuk menyederhanakan dan memahami kesulitan yang diungkapkan dan dirangkum oleh peneliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis selanjutnya dengan lebih mudah.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian kualitatif adalah hasil yang baru dan tidak biasa. Kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan penelitian. Gambar dan deskripsi hal-hal yang ambigu dapat disertakan dalam temuan, yang kemudian dijelaskan oleh peneliti agar mudah dipahami.

### 1.11 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di DPMD, yang beralamat di Jl. KSR Daddy Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasi ini dipilih karena DPMD menangani berbagai urusan yang terkait dengan topik penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data langsung di tempat yang relevan.

